

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebuah organisasi pada umumnya memiliki tujuan tertentu yang dimana ingin dicapai dalam usahanya yaitu dengan menaikkan nilai perusahaan dan meningkatkan kemakmuran pemilik atau pemegang saham. Keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuan dapat dinilai dari kinerja keuangan perusahaan yang sekaligus adalah dasar dalam proses pengambilan keputusan baik untuk pihak dalam maupun pihak luar perusahaan.

Di Indonesia dapat dijumpai beberapa fenomena yang dapat mengakibatkan kinerja keuangan perusahaan mengalami penurunan. Berdasarkan pencatatan Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penurunan kinerja industri manufaktur pada kuartal 1 2015 sebesar 0,71 persen dibandingkan dengan pencapaian Oktober-November 2014. Kepala BPS menjelaskan bahwa pelaku industri manufaktur menguasai sekitar 85-90 persen pangsa pasar manufaktur. Penurunan kinerja industri manufaktur di awal tahun juga disebabkan oleh pola belanja pemerintah yang masih rendah di awal tahun. Statistik mencatat dari 33 sektor manufaktur, sebanyak 16 sektor mengalami penurunan secara kuartalan. Penurunan terbesar adalah industri barang galian bukan logam sebesar 6,64 persen, diikuti oleh industri peralatan listrik sebesar 4,74 persen, industri kayu non furnitur minus 4,38 persen. Sementara untuk kenaikan kinerja tahunannya, industri kertas turun paling signifikan sebesar 4,04 persen. Mengekor dibawahnya

adalah industri karet dan plastik minus 3,94 persen dan industri komputer, elektronik dan optik minus 2,59 persen. Sementara itu defisit neraca perdagangan industri manufaktur mencapai puncaknya pada tahun 2012 dengan angka US\$23 miliar, walau pada 2014 berkurang menjadi US\$6,4 miliar. Ekspor produk manufaktur pada periode yang sama ternyata juga semakin menurun. Di sisi lain impor terus meningkat walaupun selalu 'tidak dipermasalahkan' oleh pemerintah, karena impor barang modal dan bahan baku/komponen dianggap memperkuat kapasitas industri nasional dengan mengesampingkan faktor eksternal. Terlebih lagi terdapat beberapa faktor yang cukup mempengaruhi dalam penurunan kinerja yakni kenaikan upah yang tidak bisa diprediksi, kenaikan tarif listrik, keterbatasan pasokan gas, dampak penguatan kurs dolar, serta tingginya impor bahan baku dan komponen, yang semuanya mendorong biaya produksi. Kondisi ekonomi dunia belakangan ini juga kurang bersahabat bagi perkembangan industri manufaktur, khususnya perlemahan pertumbuhan ekonomi pasar utama ekspor Indonesia, terjadinya gejolak politik di beberapa belahan dunia, serta derasnya arus liberalisasi perdagangan di dunia. Pasar negara berkembang saat ini dipaksa untuk terbuka walaupun negara maju masih protektif. Keterbukaan pasar Indonesia menjadi salah satu keluhan calon investor yang membutuhkan perlindungan pada awal investasi. Sebenarnya, populasi penduduk Indonesia yang besar merupakan potensi pasar yang besar bagi industri. Akan tetapi, masyarakat Indonesia belum cukup menghargai dan merasa bangga akan produk buatan bangsanya. Potensi besar ini belum dimanfaatkan sebagai faktor pendorong pertumbuhan industri. Mengekspor produk buatan dalam negeri, terutama barang modal, akan sulit

dilakukan jika bangsa kita sendiri tidak mau menggunakannya. Besarnya pasar dalam negeri bahkan semakin tererosi dengan banyaknya barang impor yang diduga diselundupkan. Saat ini, revolusi industri baru sedang berlangsung di mana wajah kompetisi industri global ditentukan oleh faktor kemajuan teknologi dan inovasi sebagai penentu daya saing. Produk industri mengalami pergeseran ke arah *product customization*, *intelligent product design*, *nano technology*, *composite*, dan *biological materials*, serta aplikasi teknologi komunikasi dan informasi terbaru pada desain. Revolusi ini memperlebar jarak industri Indonesia terhadap negara industri (www.cnnindonesia.com, www.kemenperin.go.id).

Berdasarkan fenomena yang terjadi di Indonesia maka perusahaan akan semakin gencar untuk memikirkan bagaimana caranya untuk dapat menaikkan kinerja keuangan perusahaan mereka, karena kinerja keuangan perusahaan merupakan suatu patokan yang dipakai oleh para investor untuk menilai bagaimana perkembangan kinerja perusahaan tersebut ditengah persoalan yang terjadi ataupun yang menimpa perusahaan tersebut. Jika perusahaan dapat menjaga kestabilan kinerjanya dengan baik maka akan menambah nilai positif dimata investor sehingga investor akan tertarik untuk berinvestasi di perusahaan tersebut, karena perusahaan tersebut sudah terjamin dan sudah membuktikan prestasinya melalui peningkatan kinerja keuangan. Oleh sebab itu kinerja keuangan sangat berperan penting bagi kelangsungan suatu usaha.

Setiap perusahaan di Indonesia melakukan berbagai kegiatan yang terencana untuk mencapai tujuan dari perusahaan tersebut. Kegiatan-kegiatan

tersebut umumnya akan melibatkan berbagai macam pihak, baik itu pihak dari dalam perusahaan maupun pihak dari luar perusahaan, seperti pemerintah, pihak asing, masyarakat, dan sebagainya. Dalam rangka untuk menjaga nama baik perusahaan, maka perusahaan dapat menjaga kestabilan hubungan dengan pihak lain dan mengungkapkan informasi perusahaan secara terbuka untuk publik. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas manajemen kepada *stakeholder* yang dapat mempengaruhi dalam proses pengambilan keputusan. Keseimbangan tersebut dapat dijaga dengan melakukan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dan *Good Corporate Governance*.

Dalam perkembangan CSR di Indonesia khususnya, berkembang suatu pandangan tentang tujuan ekonomi dan sosial. Perusahaan tidak bekerja secara terpisah dari masyarakat sekitarnya. Kemampuan perusahaan untuk bersaing sangat bergantung pada situasi lokasi dimana perusahaan itu beroperasi. Pengungkapan CSR pada awalnya bersifat sukarela untuk memenuhi kewajiban perusahaan, namun pada saat ini program CSR menjadi wajib karena memiliki kaitan dengan strategi dan pencapaian tujuan jangka panjang perusahaan. Hampir semua perusahaan di Indonesia mulai mengadakan program CSR di lingkungan sekitar perusahaannya, karena hal ini menjadi suatu bentuk kesungguhan perusahaan untuk menyisihkan sebagian kekayaan perusahaan guna mengurangi dampak negatif yang mungkin terjadi akibat dari kegiatan usaha perusahaan dan berupaya semaksimal mungkin untuk memaksimalkan dampak positif dari operasi perusahaan terhadap semua pihak yang berkepentingan dalam ekonomi, sosial, dan lingkungan, tetapi belum semua perusahaan menjalankan program CSR

dengan baik, padahal perusahaan tersebut mampu untuk menjalankannya. Seperti yang dikatakan oleh Suwandi ketua umum *Corporate Forum For Community Development* (CFCD) bahwa baru sebanyak 253 perusahaan yang bergabung dalam CFCD, padahal kalau melihat regulasinya semua perusahaan yang beroperasi di Indonesia berkewajiban untuk melaksanakan program CSR. Suwandi mengatakan, masih banyak perusahaan yang belum menyadari peranan penting untuk menjalankan program CSR, namun ketika bisnis mereka menghadapi masalah dengan masyarakat setempat barulah mereka menyadari pentingnya program tersebut. Padahal program CSR itu harus dirancang sedemikian rupa dengan strategi yang matang dan berkelanjutan. Program CSR sendiri diatur dalam UU No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan Perseroan Terbatas (www.surabayabisnis.com). Hal ini menunjukkan bahwa CSR itu sendiri memberikan dampak yang besar dalam keberlangsungan perusahaan, terutama dimata para *stakeholder* yang menilai perusahaan tersebut. Teori *stakeholder* juga menjelaskan bahwa perusahaan tidak dapat melepaskan diri dengan lingkungan sosial sekitarnya. Perusahaan perlu menjaga legitimasi *stakeholder* serta mendudukkannya dalam kerangka kebijakan dan pengambilan keputusan, sehingga dapat mendukung dalam pencapaian tujuan perusahaan, yaitu stabilitas kinerja dan jaminan *going concern* (Hadi Nor, 2010:95).

Dewasa ini, GCG sudah bukan merupakan pilihan lagi bagi pelaku bisnis di Indonesia, tetapi sudah menjadi suatu keharusan dan kebutuhan vital serta sudah merupakan tuntutan masyarakat dengan adanya aturan-aturan dan regulasi

yang mengatur tentang bagaimana penerapan GCG yang baik. *Corporate Governance* berkaitan erat dengan mekanisme dalam suatu perusahaan, dimana berbagai pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan tersebut dapat memastikan bahwa pihak manajer dan pihak internal badan usaha lainnya dapat memenuhi kepentingan stakeholder. Dalam mekanisme *Corporate Governance*, terdapat mekanisme internal, seperti struktur dan kepemilikan dewan komisaris, serta mekanisme eksternal, seperti pasar modal.

Konsep GCG muncul karena adanya pemisahan kepemilikan dalam suatu perusahaan. Permasalahan ini timbul karena adanya perbedaan kepentingan antara manajemen dan *stakeholder* sebagai pelaku utama dalam perusahaan. Sebuah perusahaan atau bisnis juga memiliki tugas yang berbeda untuk berbagai kelompok pemangku kepentingan, dalam kasus dimana ada konflik kepentingan antara pemilik modal/pemegang saham dengan stakeholder lainnya, maka kepentingan para pemilik modal/pemegang saham, harus dimoderasi atau dikorbankan untuk memenuhi kewajiban dasar bagi pemangku kepentingan lainnya, dalam hukum perusahaan pemilik modal/pemegang saham diberi status unggulan sebagai pemilik perusahaan, mereka mampu memilih semua atau sebagian besar anggota direksi, memiliki hak untuk mempekerjakan dan memecat para eksekutif senior dan menyetujui atau menolak kebijakan penting dan strategi perusahaan, karena status yang luar biasa dan kendali yang dimiliki oleh pemilik modal/pemegang saham berdasarkan hukum perusahaan, teori pemangku kepentingan cenderung mencurahkan perhatian yang lebih sedikit untuk membela hak-hak pemilik modal/pemegang saham. Asumsinya adalah bahwa pemilik

modal/pemegang saham sudah memiliki kekuatan untuk memastikan bahwa kepentingan mereka diperhitungkan oleh perusahaan dan para manajernya. Teori stakeholder yang telah mempertimbangkan hak-hak pemilik modal/pemegang saham biasanya mencoba untuk menunjukkan mengapa hak-hak ini harus dibatasi oleh hak atau kepentingan kelompok stakeholder lainnya. (Hamdani, 2016:30).

Prinsip GCG berkaitan dengan bagaimana usaha tersebut dijalankan atau dikelola. Hal ini diwujudkan dengan serangkaian hubungan antara manajemen, dewan direksi, pemegang saham, dan para pemangku kepentingan lainnya. Penerapan GCG akan tercapai apabila terdapat hubungan antara unsur yang terkait dengan perusahaan baik unsur internal maupun eksternal. Dewan komisaris dan dewan direksi merupakan unsur internal GCG yaitu unsur yang diperlukan di dalam perusahaan. Unsur internal yang digunakan dalam penelitian ini adalah dewan komisaris, dewan direksi dan komite audit. Dewan komisaris memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap manajemen untuk melakukan segala aktivitas dengan kemampuan terbaiknya bagi kepentingan perusahaan sehingga kinerja perusahaan nantinya akan mengalami peningkatan. Dewan direksi memiliki tugas untuk menetapkan arah strategis, menetapkan kebijakan operasional, dan memiliki hak dalam pengambilan keputusan akhir yang pada akhirnya mampu meningkatkan kinerja perusahaan. Komite audit memiliki tugas mengawasi perusahaan atas proses pelaporan keuangan, pelaksanaan audit, dan implementasi *corporate governance* di perusahaan. Unsur eksternal yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak luar baik dalam

bentuk institusi, lembaga atau kelompok lainnya. Kepemilikan institusional merupakan aspek GCG yang dapat meningkatkan kinerja keuangan. Hal tersebut dikarenakan kepemilikan institusional merupakan suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau menentang kebijakan yang dibuat oleh manajer.

Di Indonesia, beberapa perusahaan yang menjalankan program CSR dan GCG tidak pernah melihat bahwa sebenarnya CSR dan GCG memiliki keterkaitan yang signifikan. Perusahaan terkadang menjalankan CSR dan GCG tanpa mengaitkan satu dengan yang lain. Dengan adanya keterkaitan perusahaan dengan lingkungan sosialnya menuntut perusahaan untuk memenuhi pertanggungjawaban social perusahaan (CSR) sehingga diperlukannya tata kelola usaha yang baik (GCG). Dengan terlaksananya program CSR dan GCG, maka diharapkan perusahaan dapat meningkatkan perhatian terhadap lingkungan, kondisi tempat kerja, hubungan perusahaan, kinerja keuangan perusahaan, dan akses capital serta citra perusahaan dimata public menjadi baik. Jika CSR dilaksanakan maka GCG akan memadai, karena dengan dilakukannya CSR pada lingkungan perusahaan maka akan dapat memberi jaminan kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) bahwa perusahaan telah melakukan tata kelola perusahaan yang baik.

Banyak penelitian terdahulu yang mengungkapkan bahwa aktivitas CSR dan GCG berpengaruh dan memiliki hubungan yang positif terhadap kinerja keuangan dalam berbagai perspektif yang berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh Arif Rizal (2016) menunjukkan bahwa CSR dan GCG yang diprosikan oleh dewan direksi, dewan komisaris, dan komite audit berpengaruh signifikan

terhadap kinerja keuangan yang diproksikan oleh EVA, kemudian penelitian yang dilakukan oleh Retno dan Bambang (2012) menunjukkan hasil bahwa CSR dan GCG yang diproksikan oleh kepemilikan institusional, dewan komisaris, dewan direksi, dan komite audit berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Tetapi tidak semua penelitian yang dilakukan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan. Beberapa penelitian ini menunjukkan bahwa CSR dan GCG tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Ika dkk (2016) menunjukkan hasil bahwa CSR tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan, kemudian penelitian yang dilakukan oleh Melawati dkk (2016) menunjukkan hasil bahwa CSR dan GCG (kepemilikan institusional, dewan komisaris, dewan direksi dan komite audit) tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Oleh karena adanya fenomena dan ketidakkonsistenan hasil penelitian dalam penelitian sebelumnya, maka dilakukan penelitian yang berjudul “PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2012-2015)”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diungkapkan di atas, maka perumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah CSR berpengaruh terhadap kinerja keuangan?

2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja keuangan?
3. Apakah dewan komisaris berpengaruh terhadap kinerja keuangan?
4. Apakah ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap kinerja keuangan?
5. Apakah komite audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diungkapkan di atas, maka tujuan yang akan di capai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pengaruh CSR terhadap kinerja keuangan.
2. Mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan.
3. Mengetahui pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap kinerja keuangan.
4. Mengetahui pengaruh ukuran dewan direksi terhadap kinerja keuangan.
5. Mengetahui pengaruh komite audit terhadap kinerja keuangan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang di harapkan dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan input dan masukan bagi perusahaan untuk menelaah lebih lanjut mengenai pengaruh CSR dan GCG, sehingga perusahaan dapat membantu mengevaluasi, memperbaiki dan mengoptimalkan fungsi mereka dalam menilai kinerja keuangan perusahaan.

2. Bagi investor dan calon investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagi para investor mengenai pengaruh CSR dan GCG terhadap kinerja keuangan, sehingga dapat menjadi pedoman dan pertimbangan dalam berinvestasi.

3. Bagi peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk memperdalam pengetahuan tentang pengaruh CSR dan GCG terhadap kinerja keuangan perusahaan dan juga untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

4. Untuk masyarakat

Dapat menjadi bahan bacaan ataupun referensi untuk peneliti lainnya sehingga dapat membantu dalam penelitian tersebut.

1.5 **Sistematika penulisan**

Sistematika dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memberikan penjelasan mengenai berbagai teori yang menjadi tujuan utama penelitian ini dan review penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis sebagai alternative pemecahan masalah. Selain itu, dalam bab ini berisi

mengenai landasan teori yang berkaitan dengan CSR, GCG, dan kinerja keuangan.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini menunjukkan metode penelitian yang dipilih untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang telah diajukan. Kemudian, dijelaskan tentang desain penelitian, batasan penelitian, pengidentifikasian variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel, populasi, sampel, metode pengambilan sampel, jenis data dan sumber data, teknik pengambilan data, teknik analisis yang akan digunakan, dan pengujian hipotesis.

BAB IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Bab ini menguraikan tentang garis besar populasi dan sampel penelitian yang akan di analisis, beserta perincian hasil analisis data dan pembahasan mengenai hasil atau pemecahan masalah secara teoritik dalam penelitian ini.

BAB V : PENUTUP

Bab ini menjelaskan kesimpulan yaitu jawaban atas rumusan masalah dan pembuktian hipotesis, keterbatasan atas penelitian yang dilakukan serta saran bagi penelitian berikutnya dengan memperhatikan keterbatasan penelitian ini.